

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DPPKB)
KOTA JAMBI TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas PPKB Kota Jambi merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas PPKB Kota Jambi dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017 yang melibatkan seluruh unsur Dinas PPKB Kota Jambi. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017, dimana dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur dengan hasil rata rata 99,35%.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap berbagai kegiatan Dinas PPKB Kota Jambi didalam mencapai sasaran serta indikator kegiatan kami ucapkan terimakasih.

Jambi, 2018

Kepala Dinas PPKB Kota Jambi

H.M. Rasyid Rido Siregar, SH, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19591206 198212 1 002

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3. Landasan Hukum	6
1.4. Isu Strategis Dinas PPKB Kota Jambi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Indikator Kinerja Utama	12
2.3. Perjanjian Kinerja 2017	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	15
3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran	17
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
3.4. Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV PENUTUP	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,



kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas PPKB Kota Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas PPKB Kota Jambi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas PPKB Kota Jambi mempunyai fungsi :

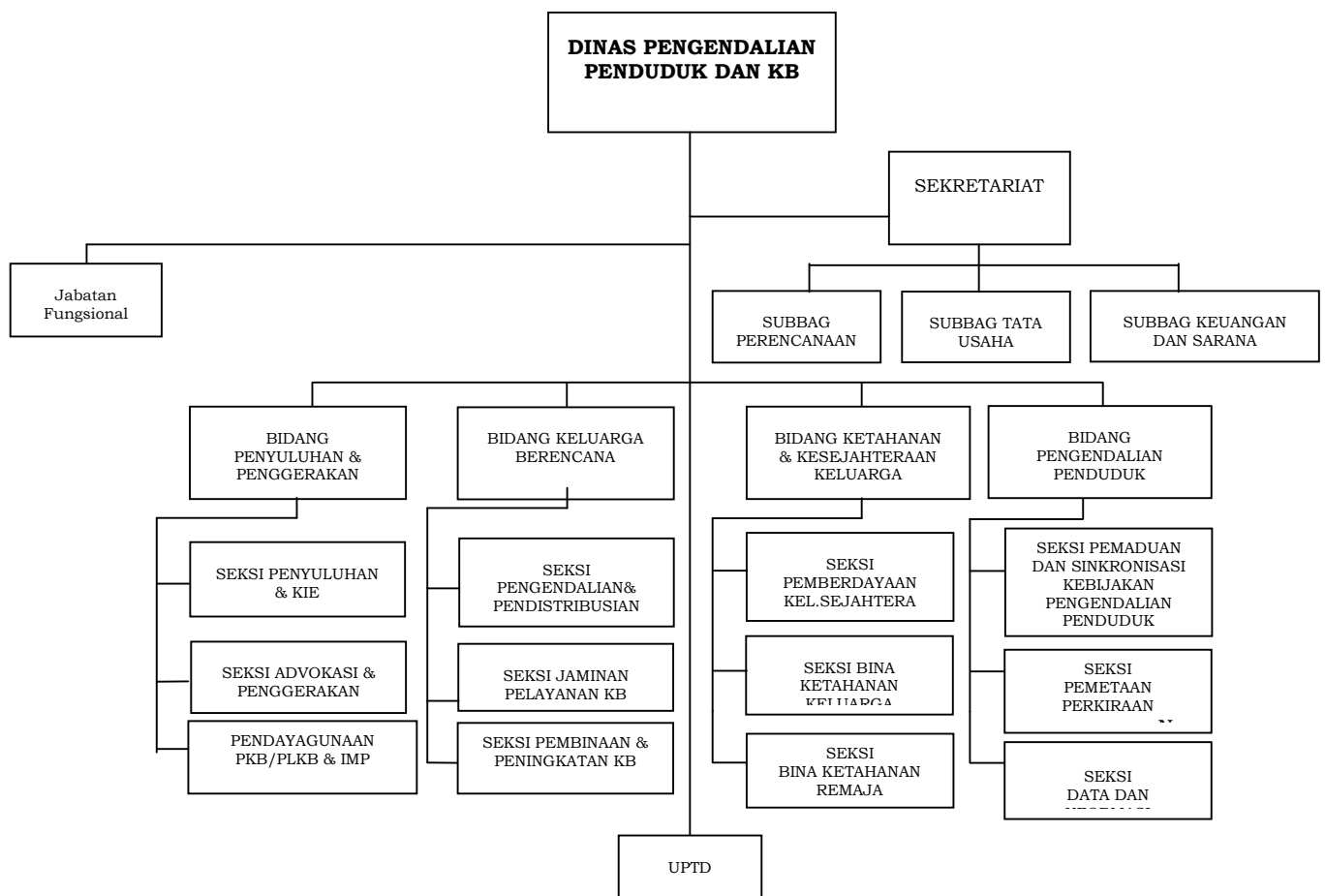
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria di Bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan KB;



- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas PPKB Kota Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan Kabid, Kasubbag, Kasubbid serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PPKB Kota Jambi





1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, meliputi :

1. Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kota Jambi.

1.4. Isu Strategis Dinas PPKB Kota Jambi

Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas PPKB Kota Jambi dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

A. Urusan Pengendalian Penduduk

- a. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan
- b. Penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan



- c. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan.
- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum

B. Urusan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

- a. Proyeksi jumlah penduduk Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan
- b. Terbatasnya petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB.
- c. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja masih rendah.
- d. Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja.
- e. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil.
- f. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif.
- g. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pria dalam ber-KB
- h. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang masih tinggi.
- i. Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB
- j. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi.
- k. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
- l. Jumlah keluarga dalam katagori prasejahtera dan sejahtera-1 masih tinggi
- m. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak.
- n. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan keluarga sejahtera dan kesadaran akan arti penting penguatan keluarga sebagai basis ketahanan sosial masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas PPKB Kota Jambi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas PPKB Kota Jambi Kota Jambi. Rencana Strategis Dinas PPKB Kota Jambi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas PPKB Kota Jambi Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas PPKB Kota Jambi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 khususnya pada Misi ke-3 RPJMD yaitu Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing seperti Tabel dibawah ini :



Tabel 2.1

Misi 3 RPJMD Kota Jambi

“Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkualitas, Berakhlak,
Berbudaya dan Berdaya Saing”

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Disemua Aspek Pembangunan	Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk	Penurunan Angka Kelahiran	Mendorong Partisipasi Aktif Pasangan Usia Subur

Disamping itu pula, Renstra Dinas PPKB Kota Jambi diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra BKKBN, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan BKKBN Provinsi Jambi sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas PPKB Kota Jambi telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Selanjutnya, Renstra Dinas PPKB Kota Jambi tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PPKB Kota Jambi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas PPKB Kota Jambi Kota Jambi dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas PPKB Kota Jambi. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Jambi dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Terwujudnya Kota Jambi yang berakhlak dan berbudaya.



Visi Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah :
"Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Menuju Kota Jambi Sejahtera dan Berkualitas"

2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas.
- b. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas hidup penduduk.
- c. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui peningkatan kesertaan keluarga dalam ber KB, meningkatkan kualitas hak-hak reproduksi, meningkatkan kesertaan keluarga dalam ekonomi keluarga, dan memantapkan pengelolaan program KB dilini lapangan.
- d. Mewujudkan penguatan kelembagaan dan strategi KIE.
- e. Meningkatkan pelayanan KB dan Revitalisasi infrastruktur pelayanan KB
- f. Mewujudkan data dan informasi yang akurat tentang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas PPKB Kota Jambi, yaitu:

- a. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas



- b. Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB dan keluarga berkualitas;
- c. Terciptanya peningkatan institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Terlaksananya penyerasian pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE;
- e. Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan;
- f. Terciptanya profesionalisme dalam pelayanan, jejaring program KB, serta revitalisasi infrastruktur;
- g. Terciptanya data dan informasi yang akurat tentang pengendalian penduduk dan KB;
- h. Terciptanya Pembinaan ketahanan dan Keluarga Sejahtera

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas PPKB Kota Jambi merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
2. Menurunkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;
3. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif;
4. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*);
5. Pelaksanaan dan pengembangan advokasi dan KIE
6. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 (satu) PKB/PLKB untuk setiap 1 (satu) kelurahan;
7. Ratio petugas pos Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 (satu) PPKBD dan Sub PPKBD 1 (satu) kader untuk 2 (dua) Rukun Tetangga (RT);
8. Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 11 kecamatan (11 Balai Penyuluh KB).
9. Penguatan tingkat institusi masyarakat perkotaan dan peran serta masyarakat;



Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas PPKB Kota Jambi Kota Jambi mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Jambi juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas PPKB Kota Jambi tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi
Tahun 2017

MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017
Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing	Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB	70

2.3. Perjanjian Kinerja 2017

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas PPKB Kota Jambi Kota Jambi Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Dinas PPKB Kota Jambi telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3.1

Perjanjian Kinerja Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Jumlah pelayanan administrasi yang diberikan	100
	Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur	100
Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB	70
	Balai Penyuluhan KB	11

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas telah dilaksanakan melalui beberapa Program berikut :

Tabel 2.3.2

Program Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	787.655.000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.029.560.000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	50.000.000
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	37.845.000
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.400.000
6	Program Perencanaan SKPD	10.300.000
7	Program Pengembangan Data/Informasi	435.000.000
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3.253.710.000
	JUMLAH	5.616.470.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Dinas PPKB Kota Jambi selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas PPKB Kota Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas PPKB Kota Jambi Kota Jambi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas PPKB Kota Jambi melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas PPKB Kota Jambi tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017

MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017
Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing	Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB	70	72,25

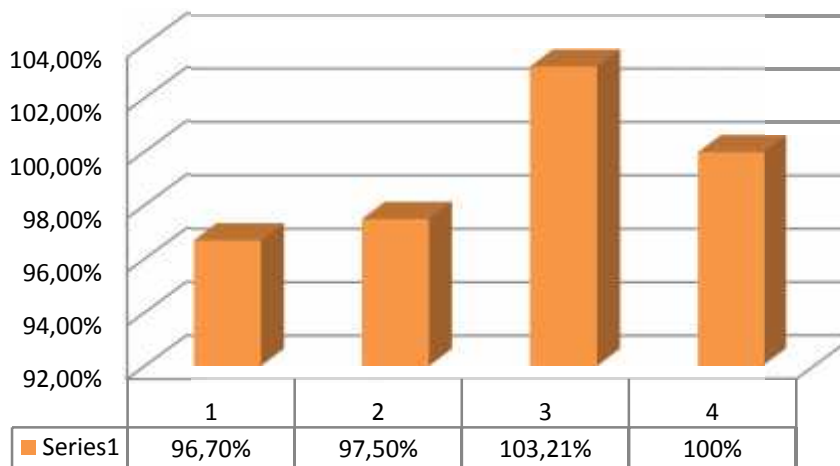
**3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

Capaian indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Jumlah pelayanan administrasi yang diberikan	100	96,70	96,70%
	Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur	100	97,50	97,50%
Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB	70	72,25	103,21%
	Balai Penyuluhan KB	11	11	100%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017





Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

3.3.1. Pencapaian Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya aparatur terhadap Jumlah pelayanan administrasi yang diberikan

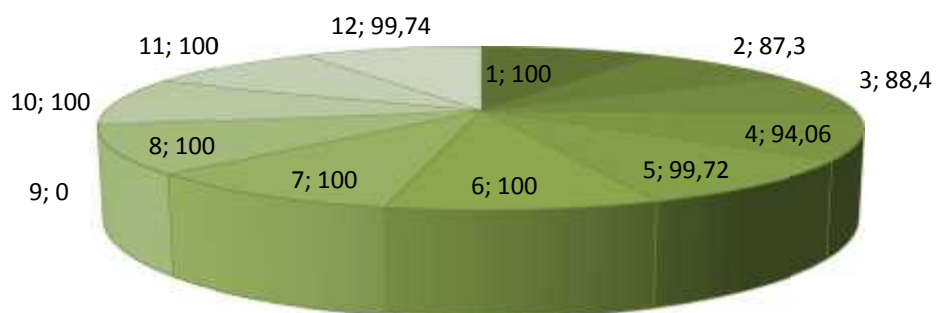
Pencapaian Sasaran ini diperoleh dari realisasi kegiatan kegiatan pada Dinas PPKB Kota Jambi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja (1) Dinas PPKB Kota Jambi
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kegiatan	Capaian		
			Anggaran	Realisasi	%
(1)	Jumlah pelayanan administrasi yang diberikan				
1		Penyediaan jasa surat menyurat	7.254.000	7.254.000	100
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	107.640.000	93.970.945	87,30
3		Penyediaan jasa	16.100.000	14.233.400	88,40



		pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			
4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	126.360.000	118.860.000	94,06
5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.547.100	63.372.100	99,72
6		Penyediaan alat tulis kantor	18.603.900	18.603.900	100
7		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.600.000	12.600.000	100
8		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.950.000	9.950.000	100
9		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000	-	-
10		Penyediaan makanan dan minuman	13.000.000	13.000.000	100
11		Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	105.600.000	105.600.000	100
12		Perjalanan Dinas	305.000.000	304.223.840	99,74

Capaian Indikator Kinerja (1) Dinas PPKB Kota Jambi**Tahun 2017**



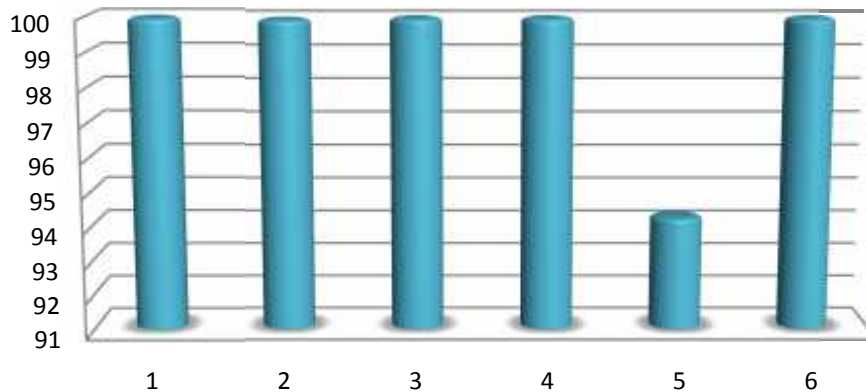
3.3.2. Pencapaian Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya aparatur terhadap Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur

Pencapaian Sasaran ini diperoleh dari realisasi kegiatan kegiatan pada Dinas PPKB Kota Jambi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.2
Capaian Indikator Kinerja (2) Dinas PPKB Kota Jambi
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kegiatan	Capaian		
			Anggaran	Realisasi	%
(2)	Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur				
1		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	230.000.000	229.928.000	99,96
2		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	150.200.000	150.150.000	99,96
3		Pengadaan mebeleur	93.700.000	93.700.000	100
4		Pengadaan peralatan perkantoran	91.300.000	91.300.000	100
5		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	447.200.000	421.590.014	94,27
6		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	17.160.000	17.160.000	100

**Capaian Indikator Kinerja (2) Dinas PPKB Kota Jambi
Tahun 2017**



	1	2	3	4	5	6
Series1	99,96	99,96	100	100	94,27	100

3.3.3. Pencapaian Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya aparatur terhadap Cakupan PUS peserta KB yang ber KB

Pencapaian Sasaran ini diperoleh dari realisasi kegiatan kegiatan pada Dinas PPKB Kota Jambi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.3

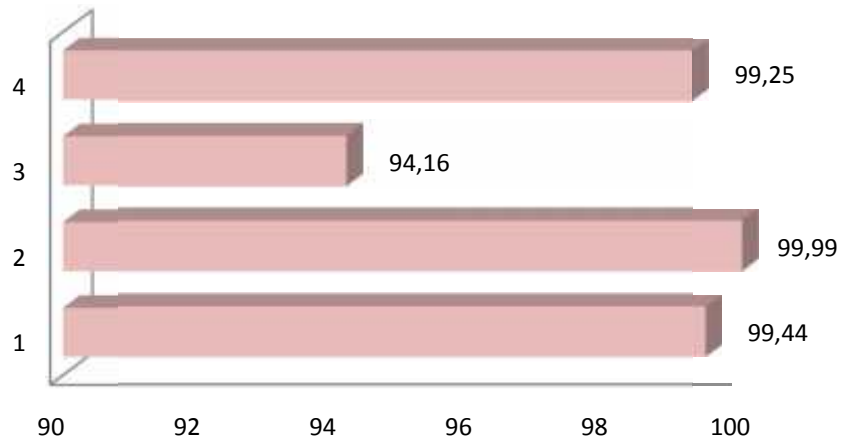
**Capaian Indikator Kinerja (3) Dinas PPKB Kota Jambi
Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Kegiatan	Capaian		
			Anggaran	Realisasi	%
(3)	Cakupan PUS peserta KB yang ber KB				
1		Pembinaan dan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	699.078.500	695.175.444	99,44
2		Kegiatan institusi dan partisipasi masyarakat serta KIE	836.340.000	836.290.000	99,99
3		Pembinaan dan operasional ketahanan	564.241.500	531.311.500	94,16



4	dan kesejahteraan keluarga			
	Pengembangan Data/Informasi	435.000.000	431.740.000	99,25

**Capaian Indikator Kinerja (3) Dinas PPKB Kota Jambi
Tahun 2017**



3.3.4. Pencapaian Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya aparatur terhadap Balai Penyuluhan KB

Pencapaian Sasaran ini diperoleh dari jumlah pembangunan Balai Penyuluhan KB di 11 Kecamatan, adapun sebelum tahun 2017 terdapat 8 Balai Penyuluhan KB dan di tahun 2017 melaksanakan pembangunan 3 Balai Penyuluhan KB, dimana 1 Balai Penyuluhan di Kecamatan Danau Sipin mengalami lanjutan pembangunan.

Tabel 3.3.4
Capaian Indikator Kinerja (3) Dinas PPKB Kota Jambi
Tahun 2017

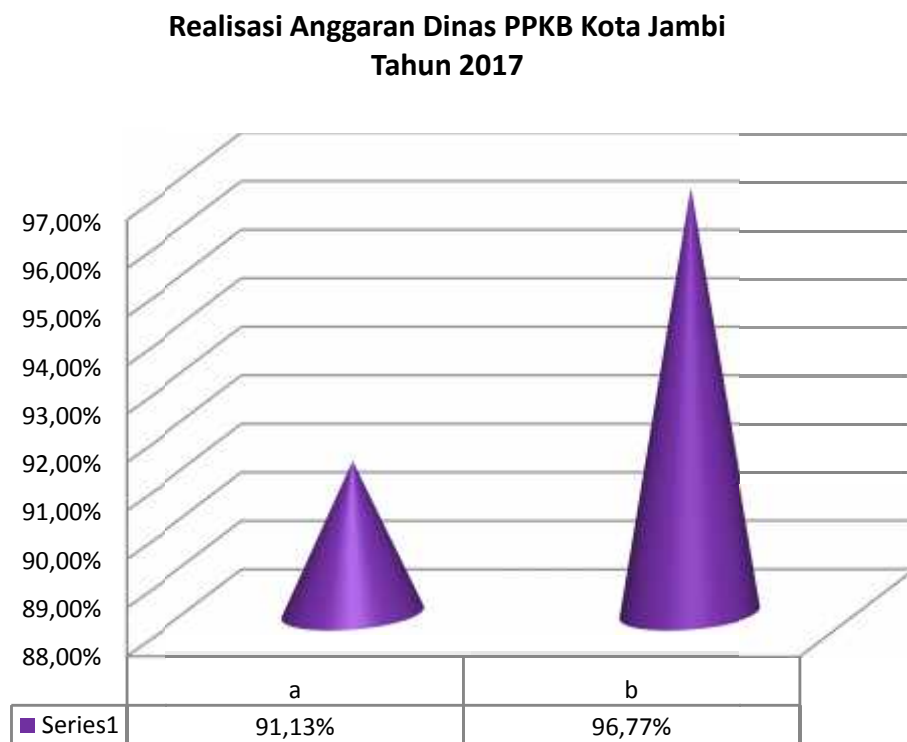
No	Indikator Kinerja	Kegiatan	Capaian		
			Anggaran	Realisasi	%
(4) 1	Balai Penyuluhan KB	Pengadaan Konstruksi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	623.000.000	619.210.000	99,39

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas PPKB Kota Jambi, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Total Anggaran Dinas PPKB Kota Jambi adalah sebesar Rp 12.559.147.780,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 11.762.595.308,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,65%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 796.552.472,-.

Adapun penjelasan dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas PPKB Kota Jambi dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.942.677.780,- dengan realisasi sebesar Rp 6.326.994.957,- (91,13%);
- b. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 5.616.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.435.600.351,- (96,77%)





Untuk rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Dinas PPKB Kota Jambi tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Dinas PPKB Kota Jambi
Tahun 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	787.655.000	761.668.185	96.70%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.029.560.000	1.003.828.014	97.50%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	50.000.000	47.600.000	95.20%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	37.845.000	36.591.000	96.68%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.400.000	12.400.000	100%
6	Program Perencanaan SKPD	10.300.000	10.300.000	100%
7	Program Pengembangan Data/Informasi	435.000.000	431.740.000	99.25%
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3.253.710.000	3.131.473.152	96.24%
	JUMLAH	5.616.470.000	5.435.600.351	96.77%



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas PPKB Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Demikian LKIP Dinas PPKB Kota Jambi Tahun 2017 ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasi dari semua pihak atas terselenggarakannya program dan kegiatan selama tahun 2017 kami ucapkan terimakasih.



